

# SOSIALISASI MANFAAT BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN KERJA PADA MASYARAKAT PEKAN SAWAH KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT

Rizki Aseandi<sup>1</sup>

Program Studi Perbankan Syariah STAI Syekh H Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai  
email: rizkiaseandi@ishlahiyah.ac.id

## Abstrak

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibentuk pemerintah dibawah naungan Presiden untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dengan status hukum sebagai Badan Hukum Publik. Tujuan adanya BPJS Ketenagakerjaan yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial tenaga kerja guna terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Jaminan sosial nasional hadir untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya resiko kerja yang terjadi telah menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan negara dalam melindungi para pekerja. Kurangnya pengetahuan masyarakat menimbulkan kesalahpahaman dan tidak ingin untuk menikmatinya padahal manfaat yang diberikan sangat besar. Pemilik hak atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya pekerja formal melainkan pekerja informal pun berhak mendapatkannya, bahkan peserta magang dan KKN memiliki hak perlindungan ini. Diperlukan peningkatan pemahaman tentang BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman kembali. Melalui optimalisasi kegiatan sosialisasi manfaat program BPJS ketenagakerjaan mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat.

**Kata kunci:** BPJS Ketenagakerjaan

## Abstract

BPJS Employment is an employment social security organizing body established by the government under the auspices of the President to administer social security programs with legal status as a Public Legal Entity. The purpose of BPJS Employment is to realize the provision of social security for workers in order to fulfill the basic needs of a decent life for each participant and their family members. National social security exists to provide welfare for the Indonesian people. The many work risks that occur have presented BPJS Employment as a form of social security provided by the state to protect workers. Lack of public knowledge gives rise to misunderstandings and people not wanting to enjoy it even though the benefits provided are very large. Owners of the right to BPJS Employment benefits are not only formal workers but also informal workers who have the right to receive them, even apprentices and KKN participants have this right to protection. It is necessary to increase understanding about BPJS Employment in the community so that there are no more misunderstandings. Through optimizing socialization activities, the benefits of the BPJS employment program accelerate improvements in people's living standards..

**Keywords:** BPJS Employment

## PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Tujuan adanya BPJS sendiri yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Di Indonesia sendiri BPJS terbagi menjadi 2 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia yang bertujuan melindungi tenaga kerja di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Dalam UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (2) program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan program Jaminan Sosial yang ditujukan untuk para tenaga kerja dengan beberapa program diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan pada tahun 2021 sesuai dengan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan program terbaru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Segmen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sendiri meliputi semua pekerja, baik pekerja sektor formal (Penerima Upah), pekerja sektor informal (Bukan Penerima Upah), pekerja jasa konstruksi (Jakon), maupun pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam mencapai target kepesertaan diperlukan perluasan kepesertaan tenaga kerja, salah satunya dengan cara sosialisasi program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Soerjono Soekanto dalam Taufiq Rochman Dhoiri, dkk (2007:79), “sosialisasi merupakan suatu proses sosial dimana seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di dalam kelompoknya”.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah guna menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Para tenaga kerja tersebut bisa berasal dari pekerja formal, informal, jasa konstruksi, dan sebagainya. BPJS Ketenagakerjaan mengimplementasikan jaminan sosial tersebut dengan lima program, di antaranya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sosialisasi berperan penting untuk menciptakan kepribadian dan identitas perseorangan, dan memengaruhi bagaimana cara mereka berhubungan dengan pribadi lain dalam masyarakat. Salah satu bentuk pemasaran ialah promosi yang diberikan lewat sosialisasi. Hal ini merupakan kegiatan yang menggunakan strategi komunikasi guna memengaruhi para konsumen serta membuat mereka untuk tertarik dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang disediakan. Pemasaran dengan bentuk sosialisasi dan promosi pun perlu menciptakan keterikatan jangka panjang dengan peserta melalui pelayanan dan pengalaman yang baik. Pada kesempatan kali ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia untuk melaksanakan proyek sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan pada program Kuliah Kerja Nyata Maksud dan tujuan dari adanya program sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan kepada para tenaga kerja. Dengan begitu pun terdapat juga pembelajaran mengenai pemasaran atau mencari akuisisi kepesertaan baru dan pemahaman bagi masyarakat Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

## METODE

Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa jenis metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan menggunakan berbagai metode. Metode pengumpulan informasi pada penelitian ini menggunakan hasil observasi alami secara langsung. Metode penyuluhan dilaksanakan dengan memaparkan materi tentang program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi manfaat program, tata cara klaim, dan pembayaran iuran. Disalurkan secara lisan untuk menginformasikan materi tersebut kepada masyarakat secara jelas. Selanjutnya ialah metode diskusi.

Pada metode ini, masyarakat terlibat dalam materi yang telah disampaikan. Di mana mahasiswa melakukan interaksi secara langsung secara dua arah dengan masyarakat. Metode terakhir adalah tanya jawab. Sesi ini berisi tentang masyarakat yang menanyakan semua kebingungan yang mereka pikirkan tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Dari metode ini, mahasiswa menjadi paham akan kendala apa saja yang dialami oleh masyarakat tentang perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan Kegiatan Pkm di Desa Pekan Sawah di mulai dengan beberapa tahapan antara lain :

### 1. Simulasi Sosialisasi

Setelah mahasiswa mendapatkan beberapa materi penting dari BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan masyarakat, mahasiswa diberi wadah untuk melatih dan mengasah kemampuan berbicara dan menyampaikan maksud dan tujuannya di hadapan banyak orang. Dengan begitu, mahasiswa mendapatkan penilaian dan evaluasi dari hasil simulasi sosialisasi sebelum terjun langsung kepada masyarakat.

### 2. Sosialisasi kepada Masyarakat

Pada tahap ini, mahasiswa sudah terjun langsung ke hadapan masyarakat untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Maksud dan tujuannya adalah untuk

memberi pemahaman lebih mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan untuk para masyarakat di Surabaya yang sedang bekerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Penelitian

Sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan proses perluasan informasi mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan suatu komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja di Indonesia. Dalam UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (2) program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan program Jaminan Sosial yang ditujukan untuk para tenaga kerja dengan beberapa program diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan pada tahun 2021 sesuai dengan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan program terbaru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik dalam mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Pemerintah berharap dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia. Untuk itu sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan harus terus dilaksanakan agar seluruh pekerja di Indonesia dapat mengetahui dan merasakan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diantaranya meliputi beberapa strategi:

#### 1. Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi diwujudkan dalam berbagai kegiatan dan kerjasama. Adanya kegiatan sosialisasi merupakan salah satu bentuk penyebaran informasi secara langsung. Disisi lain, dalam kegiatan sosialisasi humas BPJS Ketenagakerjaan juga memanfaatkan mediamedia lokal.

#### 2. Konseling

Kegiatan konselling ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat. Adanya fungsi konselling tersebut dilakukan dibawah bagian umum bidang pemasaran melalui customer service. Kegiatan konselling ini merupakan salah satu pelayanan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat baik yang telah menjadi peserta maupun yang belum menjadi peserta. Kegiatan konselling ini terbagi menjadi dua fungsi yaitu, fungsi pelayanan dan fungsi perluasan.

#### 3. Fungsi perluasan

Fungsi perluasan dalam kegiatan konselling ini ditujukan kepada masyarakat yang belum menjadi peserta maupun yang akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Masyarakat sebagai audience dalam hal ini membutuhkan keterangan yang jelas mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tata cara pendaftaran, pelayanan yang didapatkan, serta manfaat yang didapatkan.

#### 4. Meningkatkan Komunikasi

Pelaksanaan humas dalam menjalin komunikasi atau (komunikator) di BPJS Ketenagakerjaan diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Pentingnya fungsi humas dalam menjalin komunikasi juga bertujuan untuk memperoleh kepercayaan publik baik internal maupun eksternal terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

### Upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi kendala

#### 1. Segmentasi perusahaan dan tenaga kerja

Dalam menghadapi kendala yang ada, pihak BPJS akan lebih menfokuskan pada konten yang akan disampaikan serta target yang akan dicapai. Untuk mencapai target tersebut yaitu dengan cara melihat orang-orang yang menjadi sasaran segmentasinya seperti apa, kemudian memilih orang-orang yang segmentasinya dapat menunjang target perusahaan

#### 2. Keterbatasan sumber daya manusia

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan kedua yakni mengenai keterbatasan sumber daya manusia membuat prioritas target merupakan hal yang diperhatikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dalam melakukan sosialisasi biasanya memilih orang-orang yang mudah dijangkau terlebih dahulu karena keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### 3. Batasan budaya

Akibat adanya batasan budaya, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengikutsertakan tokoh masyarakat setempat untuk turut berpartisipasi dan membantu dalam kegiatan sosialisasi.

### **Respon Pekerja Informal dalam Program BPJS Ketenagakerjaan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mengukur bentuk respon dari pekerja dapat diketahui dari 3 (tiga) indikator, meliputi tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta, tingkat partisipasi pekerja informal, dan kualitas pelayanan dari aktor pelaksana. Proses aplikasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja di Desa Pekan sawah, perihal tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta belum ada kontrol dari pihak pelaksana utama. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Langkat dan pemerintah Desa Pekan sawah, saling tidak mengadakan perincian laporan khusus untuk dapat memantau tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta. Tingkat kepatuhan peserta hanya dapat dilihat dari pendataan pada Perisai, karena memang Perisai yang langsung turun menarik pembayaran iuran rutin peserta. Kelangsungan program BPJS Ketenagakerjaan terbilang belum dapat melindungi seluruh pekerja informal di Desa Pekan Sawah, hal itu dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat pekerja masih belum mencapai 50% dari total keseluruhan penduduk usia kerja. Saat peresmian Desa Pekan Sawah sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” pada Juli 2023 antusias masyarakat untuk mendaftar tinggi, namun untuk kondisi sekarang justru berbanding terbalik hanya ada beberapa orang saja yang mendaftar ke Perisai. Hal itu dikarenakan kecenderungan sikap apatis pekerja informal yang seringkali ragu terhadap manfaat jaminan sosial.

Adapun dokumentasi kegiatan Sosialisasinya antara lain :



Gamnbar 1. Dokumtasi Kegiatan

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pengabdian masyarakat ini, maka dapat disimpulkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja di Desa Pekan Sawah telah melewati serangkaian tahapan atau proses. Pertama, pembentukan pola kemitraan pelaksana telah dirancang secara sistematis dan baik. Kedua, sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan masih belum optimal untuk dapat mempengaruhi pemahaman pekerja informal. Ketiga, penerapan program BPJS Ketenagakerjaan sudah terstruktur dalam hal kinerja pelaksana, MoU, sumber daya keuangan dan peralatan, serta pembagian tugas kerja. Hasil akhir ukuran keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari respon pekerja informal yang disesuaikan dengan 3 (tiga) indikator, namun beberapa ada yang belum sesuai mulai dari adanya penurunan tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta, tingkat partisipasi pekerja informal masih rendah atau belum mencapai target keseluruhan penduduk, dan kualitas pelayanan pelaksana sudah baik dalam pengklaiman dan pembayaran. Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan memang banyak memberikan manfaat bagi kelompok penerima manfaat (pekerja informal), namun seringkali juga masih banyak keterbatasan cukup kompleks yang menghambat jalannyaprogram secara berkesinambungan. Berdasarkan penjelasan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran bagi pihak-pihak pelaksana program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Pekan Sawah. Saran peneliti diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi promotif, meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengaturan skema aplikasi yang lebih inovatif dan variatif dalam hal layanan pendaftaran, pembayaran, dan klaim, meningkatkan hubungan kerjasama dengan stakeholder pemerintahan, melakukan penganggaran insentif bagi Perisai, pekerja informal (peserta) diharapkan lebih disiplin untuk melakukan pembayaran iuran rutin sebelum batas waktu jatuh tempo.

**SARAN**

Hendaknya BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat memperluas lagi kerjasama dengan media pers tidak hanya pada media cetak tetapi juga radio dan stasiun televisi lokal sehingga dapat mempeluas penyebaran informasi dan tujuan sosialisasi dapat tercapai.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aripin, S Daud, M. 2014. Peran Administrator Public dalam Formulasi dan implementasi Kebijakan (Analisis Kurikulum 2013. *Jurnal Acaedemica Fisip Untad*. Volume 06. Nomor 01. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.670>.
- Putra, I Gusti Ngurah. 2008. *Manajemen Humas*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sutrisno, H. (2020). Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 78–84.
- Taufiq Rohman Dhoiri, dkk. 2007. *Sosiologi: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Yudhistira.
- Undang-undang Tahun 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.